

## ABSTRAK

### **Pengaruh Ketergantungan Keuangan, Efisiensi Keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial sustainability*) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurusan Akuntansi

Kisti Dea Arsita, 2026 (+62)

Email: [kistidearst@gmail.com](mailto:kistidearst@gmail.com)

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKP Provinsi) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode tahun 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang menghasilkan 34 provinsi sebagai sampel penelitian dengan total 170 observasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) yang diolah melalui perangkat lunak *Eviews* 13. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dan efisiensi keuangan masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, yang berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan dan rasio efisiensi keuangan pemerintah provinsi, maka semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangannya. Sebaliknya, *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Secara simultan, hasil penelitian membuktikan bahwa ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia, dengan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 12,87%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi keberlanjutan keuangan daerah.

**Kata kunci:** ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, *debt to equity ratio*, keberlanjutan keuangan, pemerintah provinsi

## ABSTRACT

### **The Influence of Financial Dependence, Financial Efficiency, and the Debt-to-Equity Ratio on *Financial sustainability*: Evidence from Provincial Governments in Indonesia.**

*Politeknik Negeri Sriwijaya, Accounting Department*

Kisti Dea Arsita, 2026 (+62)

Email: [kistidearst@gmail.com](mailto:kistidearst@gmail.com)

---

*This study aims to examine the effects of financial dependence, financial efficiency, and the debt-to-equity ratio (DER) on financial sustainability among provincial governments in Indonesia. This study employs a quantitative approach using secondary data in the form of the Provincial Government Financial Statements (LKP Provinsi) audited by the Indonesian Audit Board (BPK RI) for the period 2020–2024. The sampling technique used was purposive sampling, which resulted in 34 provinces as the study sample with a total of 170 observations. The data analysis technique applied was panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM), processed using Eviews 13 software. The results of the partial tests indicate that financial dependence and financial efficiency each have a negative and significant effect on financial sustainability, meaning that the higher the level of financial dependence and the financial efficiency ratio of a provincial government, the lower its level of financial sustainability. Conversely, the debt-to-equity ratio (DER) does not have a significant effect on financial sustainability. Simultaneously, the research results demonstrate that financial dependence, financial efficiency, and the debt-to-equity ratio collectively have a significant effect on the financial sustainability of provincial governments in Indonesia, with an Adjusted R<sup>2</sup> value of 12.87%, indicating that other factors outside the model also influence regional financial sustainability.*

**Keywords:** *financial dependence, financial efficiency, debt to equity ratio, financial sustainability, provincial government*